



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 03 PIYAM DESA TINTIN PENINJAU  
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang DPR di TPS 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :**
1. Surat Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 138/PANWASLU/KKH/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang DPR di TPS 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 37/BA/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Penetapan Pemungutan Suara Ulang DPR di TPS 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang DPR di Tempat Pemungutan Suara 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
- KEDUA :** Menetapkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang DPR di TPS 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
- KETIGA :** Pemungutan Suara Ulang DPR dimaksud akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 dengan tata cara sesuai Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Empanang, PPS Desa Tintin Peninjau dan KPPS Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Piyam Desa Tintin Peninjau untuk melaksanakan Keputusan ini;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal : 17 April 2014

KETUA,  
  
LISMA ROLIZA